

NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Ilham

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima
Jl. Anggrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima
jurnal.sangaji@gmail.com

Abstract:

Marriages is a basic right of every body who want to make good and quality family. The term of marriages in nationality or positive law administrative namely marriages registered and unregistered. Today, the marriages unregistered is one of the debatable issues because it assumed illegal marriages. In this paper, writer compared the concept of Islamic and Positive Law toward the Unregistered Marriages. Positively, unregistered marriages is assumed that illegal or not written by Marriage Writer although it become legal based on Islamic Concept. This problem has to concern by every one because it will influence to Kid and Wife's right. Meanwhile, in Islamic Concept does not know about the Registered Marriages because the marriages is assumed legal if the requirements are fulfilled.

Keywords: Unregistered Marriages, Positive Low, Islamic Low

Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan kita sebagai manusia yang memang diciptakan untuk mendapatkan pasangan hidup saat kita siap dan menginginkannya. Sebagaimana telah di jelaskan dalam pasal 1 UU No.1/1974 tentang perkawinan, bahwa 'perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Dan diatur pula mengenai sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta ketentuan dalam suatu perkawinan untuk pentingnya dilakukan pencatatan sebagaimana bunyi ayat 2 bahwa Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan memang sangat perlu dilakukan dengan tujuan sebagaimana tertera pada nomor 4 huruf b Penjelasan Umum UU Perkawinan, bahwa “Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya pencatatan tersebut bertujuan untuk terlaksananya tertib administrasi supaya tidak terjadi ketidakjelasan status dalam suatu perkawinan dan perkawinan tersebut memiliki perlindungan hukum bila suatu waktu terjadi sengketa.

Namun fakta yang sedang terjadi saat ini adalah ketidakpatuhan yang dilakukan sebagian masyarakat dalam melakukan pernikahan atau perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni disebut nikah siri. Sehingga hal itu menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan perkawinan seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dapat disebut pula perkawinan yang tidak taat hukum.

Nikah *sirri* menjadi perdebatan hangat karena sangat berbeda dengan nikah resmi pada umumnya. Apabila ditinjau dari sudut hukum Islam dan hukum positif nasional, pernikahan model ini menjadi perdebatan yang kompleks, dilematis, dan juga bersifat problematik.

Nikah Sirri Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

Undang-undang Perkawinan

Ketika syariat Islam tentang perkawinan sudah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dalam bentuk Undang-undang Perkawinan No. I Tahun 1974, maka umat Islam di Indonesia mempunyai kewajiban

untuk menaatinya. Undang-undang itu merupakan hasil ijtihad para tokoh serta para ulama untuk mengakomodir syariat Islam dalam perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (I) menegaskan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan pasal 2 ayat (I) ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945 dan bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹

Kemudian pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 9/1975 pasal 2 ayat (1) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menerangkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”²

Sehubungan dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) beserta PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN belumlah dianggap sebagai perkawinan

¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003), h. 151.

² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h. 159.

yang sah. Itulah sebabnya perkawinan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan.

Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan status, posisi KHI dalam tata hukum nasional maka dapat dipergunakan sebagai pegangan atau pedoman dalam membahas perkawinan dalam sudut pandang hukum positif nasional.

Pasal 4 menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”*. Berdasarkan pasal tersebut jelas terlihat bagaimana posisi KHI yang mendukung ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

KHI menyebutkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu dalam pasal 5 ayat (1) *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*. Penegasan KHI bisa menjadi pedoman bahwa nikah *sirri* yang tidak dicatatkan, disamping tidak sesuai dengan aturan hukum formal yang berlaku di negara ini juga dianggap tidak memenuhi ketertiban perkawinan. Penertiban pencatatan perkawinan dimaksudkan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Tentang tatacara pencatatan yang dimaksud tersebut, pasal 6 ayat (1) mengatur *“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah”*. Tatacara pencatatan ini penting agar nantinya mempunyai kekuatan hukum, sebab sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2): *“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”*.

Pada prinsipnya KHI melarang perkawinan secara *sirri*. Meskipun istilah nikah *sirri* tidak disebut sama sekali dalam KHI, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan ketidakbolehan nikah *sirri*.

Nikah Sirri Menurut Perspektif Hukum Islam

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebagian masyarakat berpendapat nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2008 M/17 Ramadhan 1429 H:

Pertama: Ketentuan Umum

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Pernikahan Di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrah*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*madharrah* (*saddan lidz-dzari'ah*).³

Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Sirri

Berbicara tentang nikah *sirri*, ada banyak faktor yang melatar belaknginya, di antaranya faktor pengetahuan masyarakat yang belum bulat, pengetahuan masyarakat dalam hal ini terpecah-pecah, sehingga ada yang menyatakan “perkawinan sah menurut agama” dan “perkawinan sah menurut hukum negara”.

Faktor lain yang banyak menyebabkan seseorang melakukan nikah *sirri* adalah untuk beristri lebih dari satu (poligami). Kasus ini sering terjadi karena untuk menghindari kontroversi di masyarakat. Memang harus diakui bahwa poligami masih dianggap tindakan yang tidak lazim di Indonesia walaupun diperbolehkan dalam agama, sehingga kalau

³ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2011), h. 534.

seseorang menyatakan secara lisan untuk melakukan poligami dianggap sebagai sesuatu yang salah dan aneh.

Kasus ini juga biasa terjadi pada lingkungan pegawai negeri atau pejabat negara untuk melakukan poligami berkedok demi menghindari zina, karena ketatnya PP No. 10 Tahun 1983 tentang larangan poligami bagi PNS dan pejabat negara, akan memilih melakukan nikah *sirri* demi karir dan keluarga. Selanjutnya dari berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, adanya nikah *sirri* atau perkawinan di bawah tangan, selain faktor budaya dan alasan poligami, juga dilatarbelakangi permasalahan di antaranya:

1. Faktor ekonomi, merasa belum mampu untuk melaksanakan resepsi perkawinan. Alasan ini biasanya dikemukakan oleh mereka yang menikah tetapi merasa belum mampu secara ekonomi, sehingga berpikir bahwa menikah itu berat karena harus mengeluarkan biaya yang besar. Alasan ini sebenarnya kurang pas karena untuk mendaftarkan perkawinan ke KUA tidak harus disertai dengan resepsi perkawinan apalagi yang menghabiskan biaya besar.
2. Tidak mendapat restu dari orang tua. Misalnya pihak orang tua dari salah satu pasangan tidak merestui pernikahan mereka, sedangkan mereka sudah terlanjur saling mencintai, sehingga mereka sepakat menikah *sirri* sampai orang tua mereka merestui pernikahan mereka.
3. Perbedaan agama, sebab untuk mengurus administrasi perkawinan beda agama tidak mudah, maka mengambil jalan pintas dengan menikah *sirri*.
4. Faktor kesegeraan dalam melangsungkan perkawinan agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, seperti hamil di luar nikah, aborsi dan pergaulan bebas.
5. Masih terikat kontrak dengan pekerjaan yang mengharuskan status lajang.⁴

Dampak Nikah *Sirri*

Nikah *sirri* di satu sisi mempunyai aspek positif sehingga banyak dilakukan oleh sejumlah kalangan namun juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang jauh lebih besar yang akan merugikan pasangan

⁴ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), h. 30-31.

nikah *sirri*, khususnya pihak istri dan anaknya kelak.

Aspek positif nikah *sirri* di antaranya dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara laki-laki dan perempuan atau biasa dibahasakan untuk menghindari zina. Selanjutnya nikah *sirri* dilakukan karena urusannya mudah, dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah perkawinan dan jangan menunda meskipun terdesak beban ekonomi.⁵

Dampak yang paling merugikan pihak istri adalah aspek yuridis, disamping juga akan merasakan dampak dari aspek sosial, psikologis ekonomi dan sebagainya.

Akibat yuridis yang akan dialami sang istri cukup banyak, di antaranya:

- a. Nikah *sirri* tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum sehingga istri yang telah dinikahi tidak dianggap sebagai istri yang sah.
- b. Istri dari hasil nikah *sirri* tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
- c. Istri dari hasil nikah *sirri* tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum nikah *sirri* dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.⁶

Di samping dampak dari aspek yuridis tersebut, pihak istri juga akan mengalami dampak negatif dari aspek sosial. Pada umumnya istri dalam nikah *sirri* sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Wanita yang tinggal serumah dengan suami yang merupakan hasil nikah *sirri* akan menjadi buah bibir di lingkungan tempat tinggalnya.

Nikah *sirri* juga berdampak negatif terhadap kehidupan anak dan masa depannya, di antaranya:

- a. Kerugian yang harus ditanggung oleh anak dari hasil nikah *sirri* adalah akan dianggap sebagai anak yang tidak sah dan pada akhirnya anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Secara hukum anak tersebut

⁵ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, h. 26.

⁶ Syamsuddin Ramadhan, *Hak Anak Istri dalam Pernikahan Sirri*, <http://advokatku.blogspot.com>. diakses pada tanggal 8 Mei 2017, Pukul 11:12.

tidak memiliki hubungan dengan sang ayah.

- b. Status anak yang tidak jelas di mata hukum akan menimbulkan lemahnya hubungan antara anak dengan ayah, dan seandainya suatu saat ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya, maka sang anak tidak akan memiliki bukti yang dapat ia gunakan untuk melakukan pembelaan atau melakukan gugatan.
- c. Yang paling merugikan bagi anak adalah bahwa anak tersebut tidak memiliki hak atas nafkah, biaya pendidikan, biaya kehidupan dan warisan dari sang ayah jika ayahnya meninggal.⁷

Rekonstruksi Syarat Perkawinan di Indonesia Untuk Mempertemukan Perspektif Fikih Dan Hukum Nasional

Kehadiran Undang-undang perkawinan seyogyanya ditaati oleh semua warga sebagai kewajiban agama dan negara karena bertujuan demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Dibahasakan oleh M. Hasbi Umar bahwa Undang-undang perkawinan tersebut dianggap sebagai fikih *munākahāt* bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa kitab-kitab fikih klasik sesuai dan relevan pada masanya, sedangkan untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangka usaha pembaharuan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi era modern.⁸

Di dalam kitab-kitab fikih, pencatatan perkawinan memang tidak termasuk dalam rukun dan syarat sahnya perkawinan. Namun berdasarkan analisis hukum Islam, pencatatan merupakan syarat sahnya suatu akad muamalah. Proses ini sangat penting sebagai bukti autentik yang dapat memperkuat komitmen pasangan suami istri agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu dari keduanya, termasuk anak.

Untuk menghapus dikotomi antara agama dan negara maka perlu mempertemukan antara syarat sah perkawinan menurut agama dan syarat sah perkawinan menurut undang-undang. Untuk mencapainya langkah yang paling ampuh adalah merekonstruksi syarat sah

⁷ Albaroni, *Nikah Sirri Berdampak pada Masa Depan Anak*, <http://mbakdlloh.wordpress.com>. diakses pada tanggal 8 Mei 2017, Pukul 11:15.

⁸ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Cet.I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 17.

perkawinan dengan menambah pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan, untuk menekan terjadinya perkawinan di bawah tangan sebab sesungguhnya peraturan pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Menurut Imam syaukani ada tiga pendekatan untuk membuktikan bahwa pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹

Pertama, pendekatan hisotris. Dalam kitab-kitab fikih tidak menyebutkan tentang pencatatan perkawinan, bisa karena kitab-kitab fikih tersebut ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi. Sehingga kemungkinan penyalahgunaan lembaga perkawinan yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain relatif kecil.

Kedua, pendekatan *qāidah al-fiqhiyah* ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (tiada sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya). Berkaitan dengan penggunaan kaidah ini pada kasus pencatatan perkawinan, Imam Syaukani berangkat dari anggapan bahwa pencatatan suatu perkawinan adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. Dengan demikian, berlakulah ketentuan kaidah tersebut, yaitu tiada sempurna sebuah perkawinan kecuali dengan adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnya.

Ketiga, pendekatan maslahat. Pendekatan ini muncul sebagai jawaban terhadap pandangan sebagian orang yang menyatakan bahwa nikah *sirri* atau tanpa pencatatan PPN adalah sah menurut agama. Imam Syaukani bahkan berani mengatakan bahwa nikah *sirri* hanya sah menurut fikih, tidak atau belum sah menurut agama. Menurutny pesan yang dibawa oleh agama adalah universal. Artinya, segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umun.

Di samping itu, untuk menganggap bahwa sahnya suatu akad nikah yaitu apabila telah dilakukan menurut ketentuan syariat Islam dan dicatat oleh PPN adalah dengan menggunakan dalil syariah yang menyatakan bahwa menaati perintah agama dan pemerintah adalah wajib.

⁹ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 253-254.

Oleh sebab itu, ketentuan tentang pencatatan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah wajib ditaati oleh warga negara yang mengaku dirinya taat kepada agamanya. Sebab aturan tersebut dibuat dengan pertimbangan kemaslahatan. Sementara agama sangat mengutamakan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan pendekatan atau metode yang dikemukakan tersebut, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam konteks keindonesiaan, tidak terlepas pula dari dampak nikah *sirri*, maka sudah sangat beralasan dan urgen untuk menjadikan rukun perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan di Indonesia tidak hanya lima syarat, tetapi jumlahnya bisa menjadi enam, yaitu ditambah dengan ketentuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, PPN dari Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi warga negara non muslim.

Kesimpulan

Di kalangan ulama dan cendikiawan Indonesia, terdapat perbedaan pandangan tentang nikah *sirri*, ada yang melarang, membolehkan dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri. Menurut Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) maka dapat dipahami bahwa suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikahnya oleh PPN secara simultan.

Pada prinsipnya KHI melarang perkawinan secara *sirri*. Meskipun istilah nikah *sirri* tidak disebut sama sekali dalam KHI, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan ketidakbolehan nikah *sirri*. Nikah *sirri* di satu sisi mempunyai aspek positif sehingga banyak dilakukan oleh sejumlah kalangan namun juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang jauh lebih besar yang akan merugikan pasangan nikah *sirri*, khususnya pihak istri dan anaknya kelak. Untuk menghapus dikotomi antara agama dan negara

maka perlu mempertemukan antara syarat sah perkawinan menurut agama dan syarat sah perkawinan menurut undang-undang. Untuk mencapainya langkah yang paling ampuh adalah merekonstruksi syarat sah perkawinan dengan menambah pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan, untuk menekan terjadinya perkawinan di bawah tangan sebab sesungguhnya peraturan pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Daftar Pustaka

- Albaroni, *Nikah Sirri Berdampak pada Masa Depan Anak*, <http://mbakdlloh.Wordpress.com>. diakses pada tanggal 8 Mei 2017.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003.
- Hidayatullah, *Kontroversi Nikah Sirri*, <http://www.hidayatullah.com>.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2011.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*. Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ramadhan, Syamsuddin. *Hak Anak Istri dalam Pernikahan Sirri*. <http://advokatku.blogspot.com>.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid*. Juz II. Cairo: Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1339.
- Susanto, Happy. *Nikah Sirri Apa Untungnya?*. Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Cet.I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz VII. Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk. "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" *Mimbar Hukum*, No. 28, 1996.